

## NASIONALISME INKLUSIF DAN PENGUATAN IDENTITAS INDONESIA

Aminuddin<sup>1</sup>, Ridha Nida Neilofer Nasution<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[aminuddin@uinsu.ac.id](mailto:aminuddin@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [ridhanida779@gmail.com](mailto:ridhanida779@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas nasionalisme dan jati diri bangsa Indonesia dengan menekankan pada akar sejarah, dimensi budaya, serta relevansinya di era globalisasi. Nasionalisme Indonesia memiliki karakteristik khas karena tidak hanya lahir dari pengalaman kolonial dan perjuangan politik, tetapi juga berakar pada nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai pandangan akademik yang menunjukkan bahwa nasionalisme menjadi fondasi penting dalam membangun persatuan bangsa di tengah keragaman etnis, budaya, dan agama. Jati diri bangsa dipahami sebagai identitas kolektif yang dibentuk oleh sejarah, simbol nasional, serta nilai luhur yang diwariskan lintas generasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa nasionalisme yang inklusif dapat menjadi kekuatan perekat bangsa sekaligus strategi dalam menghadapi tantangan modernisasi, globalisasi, dan penetrasi budaya asing tanpa kehilangan ciri khas kebangsaan.

**Kata Kunci:** Nasionalisme, Identitas, Inklusif

### Abstract

This study explores nationalism and national identity in Indonesia, emphasizing their historical roots, cultural dimensions, and relevance in the era of globalization. Indonesian nationalism is unique because it emerged not only from colonial experience and political struggle but also from religious values and local wisdom. Using a literature study approach, this research reviews various academic perspectives showing that nationalism plays a crucial role in fostering unity within Indonesia's ethnic, cultural, and religious diversity. National identity is understood as a collective construct shaped by history, national symbols, and values transmitted across generations. The findings suggest that inclusive nationalism can serve as a unifying force and a strategic response to the challenges of modernization, globalization, and foreign cultural influence while preserving the nation's distinctive character.

**Keywords:** Nationalism, Identity, Inclusiveness

## PENDAHULUAN

Nasionalisme merupakan fenomena yang tumbuh kuat pada era modern, meskipun akar-akar pemikirannya dapat ditelusuri sejak zaman Yunani kuno. Pada abad ke-20, nasionalisme mencapai puncaknya sebagai kekuatan politik dan sosial yang mampu mengubah wajah dunia. Di Indonesia, semangat

nasionalisme mulai terlihat sejak berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908. Walaupun tujuan awalnya hanya sebagai wadah perkumpulan etnis Jawa dan Madura (etno-nasionalisme), namun di dalamnya sudah terkandung nilai-nilai nasionalisme yang kemudian berkembang menjadi spirit kebangsaan.

Para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia juga senantiasa menekankan pentingnya nasionalisme dalam perjuangan mereka. Nasionalisme menjadi landasan moral dan motivasi untuk melawan penjajah, baik dalam merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Kecintaan terhadap tanah air bahkan dipandang sebagai ajaran luhur yang sejalan dengan nilai-nilai agama, khususnya dalam Islam. Rasa cinta tanah air (*hubbul wathan*) dipandang sejajar dengan kecintaan terhadap agama, sehingga meneguhkan tekad umat Islam untuk menolak segala bentuk penindasan.

Peran ulama, kiai, dan guru ngaji pada masa kolonialisme sangatlah besar dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan. Mereka bukan hanya menyuarakan perlawanan terhadap penjajah, tetapi juga mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengakar pada nilai religius, seperti larangan mengenakan pakaian khas Belanda (*pantaloon* dan dasi) karena dianggap menyerupai kaum penjajah kafir. Langkah ini bukan semata simbol perlawanan, melainkan juga upaya menjaga identitas bangsa dari pengaruh asing. Perjuangan mereka menunjukkan bahwa agama dan nasionalisme dapat berjalan seiring, saling menguatkan demi membebaskan bangsa dari belenggu kolonialisme.

Kecintaan terhadap tanah air juga membuat umat Islam di Indonesia terbuka terhadap kebijaksanaan lokal (*local wisdom*). Nilai-nilai tradisi, budaya, dan kearifan masyarakat daerah diterima dan dipadukan dengan semangat perjuangan kebangsaan. Sikap inklusif ini memungkinkan umat Islam berkolaborasi dengan berbagai elemen bangsa lainnya, terlepas dari perbedaan etnis, budaya, maupun agama. Sinergi inilah yang menjadi fondasi kuat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai rumah bersama bagi seluruh rakyat.

Lebih dari itu, nasionalisme di Indonesia memiliki dimensi yang khas karena tidak hanya didorong oleh faktor politik, tetapi juga oleh landasan spiritual dan budaya. Nasionalisme Indonesia bukan sekadar ikatan ras atau darah, melainkan kesadaran kolektif untuk hidup bersama dalam satu negara berdaulat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Hal ini membedakan nasionalisme Indonesia dengan bentuk-bentuk nasionalisme di negara lain yang kerap eksklusif dan etnosentris.

Di era modern, semangat nasionalisme tidak lagi hanya berbicara soal perjuangan melawan kolonialisme, tetapi juga menjaga kedaulatan bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi. Arus budaya asing, perkembangan teknologi, hingga persaingan ekonomi global menuntut bangsa Indonesia untuk tetap berpegang pada identitas kebangsaan tanpa menutup diri terhadap perubahan. Dengan nasionalisme yang inklusif, Indonesia mampu menyerap hal-hal positif dari luar sekaligus mempertahankan jati diri bangsa.

Selain itu, nasionalisme menjadi pendorong utama bagi terciptanya persatuan dalam keberagaman. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan etnis, bahasa, dan budaya, membutuhkan ikatan ideologis yang kokoh agar tidak tercerai-berai. Nasionalisme berfungsi sebagai perekat sosial yang menyatukan berbagai elemen bangsa dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Tanpa

semangat nasionalisme, perbedaan yang ada justru bisa menjadi sumber konflik yang melemahkan bangsa.

Perjalanan panjang nasionalisme Indonesia juga menunjukkan bahwa semangat ini selalu berkembang sesuai konteks zaman. Dari masa perjuangan fisik melawan kolonialisme, era pembangunan pasca-kemerdekaan, hingga menghadapi tantangan dunia digital saat ini, nasionalisme tetap menjadi energi utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu, tugas generasi penerus bangsa adalah menjaga, menanamkan, dan mengembangkan semangat nasionalisme agar tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan.

Pada akhirnya, nasionalisme Indonesia adalah wujud cinta tanah air yang berakar pada sejarah, budaya, dan nilai agama, sekaligus terbuka terhadap perubahan zaman. Semangat ini harus terus dipelihara agar bangsa Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga maju sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan bermartabat di tengah pergaulan dunia. Nasionalisme bukan sekadar kenangan sejarah, melainkan kompas moral yang akan terus menuntun langkah bangsa menuju cita-cita besar kemerdekaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena tema nasionalisme dan jati diri bangsa lebih tepat dikaji melalui telaah teori, konsep, dan gagasan yang berkembang dalam literatur akademik. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat menelusuri pemikiran dan temuan sebelumnya untuk memahami nasionalisme secara konseptual, historis, dan normatif.

Sumber data penelitian berasal dari buku, artikel jurnal, prosiding, dan laporan penelitian yang relevan. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis dan penerbit. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dari perpustakaan, jurnal online, dan database ilmiah, kemudian dipilah berdasarkan tema, seperti perkembangan nasionalisme, identitas bangsa, dan tantangan globalisasi.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi dengan pendekatan deskriptif-analitis. Langkahnya dimulai dengan membaca kritis setiap sumber, menandai bagian relevan, lalu menyusun rangkuman tematik sesuai kategori yang ditentukan. Hasil rangkuman tersebut kemudian disintesis menjadi kerangka konseptual yang utuh. Dengan cara ini, penelitian menghasilkan pemahaman komprehensif tentang nasionalisme dan jati diri bangsa serta mampu memberikan kontribusi bagi pengayaan wacana akademik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Nasionalisme: Konsep, Akar, dan Perkembangan**

Secara etimologis kata nasionalisme, akar katanya *national* yang diambil dari *natio* yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata *natio* berasal kata *nascie* yang berarti dilahirkan. *Nation* atau bangsa menurut Hans Kohn adalah golongan-golongan yang beragam dan tidak dapat dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lainnya, seperti kesamaan keturunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adapt istiadat, tradisi, perasaan dan agama. Akan tetapi tidak satupun diantara faktor-faktor itu bersifat mutlak guna merumuskan bentuk dasar sebuah bangsa. Menurut Benedict Anderson bangsa

adalah komunitas politik yang terbatas dan berdaulat yang dicita-citakan atau diangankan.

Komunitas politik dikatakan sebagai imagined, karena anggota komunitas tidak pernah saling mengenal, saling bertemu, atau bahkan saling mendengar. Hal yang ada dalam pikiran masing-masing anggota komunitas hanyalah angan-angan tentang komunitasnya. Suatu bangsa akan terbentuk jika sejumlah besar warga dalam suatu komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan. Dalam pandangan Ernest Renan bangsa adalah kesatuan. solidaritas yang digantungkan atas kehendak warganya untuk secara bersama dalam identitas kolektif baru yang melampaui garis-garis primordial sektarian. Renan mengemukakan bahwa bangsa tidak disamakan dengan kesatuan manusia yang didasarkan atas kesamaan ras, bahasa, agama, dan geografi. Sedangkan menurut Joseph Stalin bangsa merupakan suatu komunitas yang terbentuk dari bahasa, wilayah, kehidupan ekonomi dan psikologis yang stabil dan berkembang secara histories termanifestasi dalam suatu komunitas kebudayaan (Kohn, Hans., 1984)

Nasionalisme menurut Hans Kohn adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Sebelum lahirnya nasionalisme, kesetiaan orang tidak ditunjukkan kepada negara bangsa tetapi ditujukan kepada berbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, raja, kesatuan ideologi seperti suku, negara kota, kerajaan dinasti atau gereja. Hal yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Sartono Kartodirjo. Menurutnya nasionalisme adalah ideologi yang mencakup lima prinsip yaitu unity (kesatuan) yang merupakan syarat yang tidak bias ditolak, liberty (kemerdekaan) termasuk kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat, equality (persamaan) bagi setiap warga untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing, personality (kepribadian) yang terbentuk oleh pengalaman budaya dan sejarah bangsa, dan performance dalam arti kualitas atau prestasi yang dibanggakan kepada bangsa lain (Yapeta Pusat.,1995)

Menurut Ensiklopedi Indonesia nasionalisme adalah sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dan dengan demikian merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa. Dengan demikian kata kunci dalam nasionalisme adalah kesetiaan, yang muncul karena adanya kesadaran akan identitas kolektif yang berbeda dengan lainnya. Pada kebanyakan kasus kesetiaan itu terjadi karena kesamaan keturunan, kebudayaan, bahasa. Akan tetapi semua unsur bukanlah unsur yang substansial, sebab yang ada dalam nasionalisme. Sedangkan cita-cita nasionalisme menurut Hertz ada empat macam: Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi persatuan dalam politik, ekonomi, keagamaan, kebudayaan, dan persekutuan serta solidaritas. Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari penguasa asing atau campur tangan dari dunia luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern yang bersifat anti nasional atau yang hendak mengesampingkan bangsa dan Negara. Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (separateness), pembedaan (distinctiveness), individualitas dan keaslian (originality). Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan diantara bangsa-bangsa yang memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh.

Nasionalisme dipahami sebagai kesadaran kolektif dan ikatan politik yang menjadikan sekelompok manusia merasa sebagai satu bangsa dengan kepentingan bersama; akar gagasan ini sudah ada sejak masa lampau tetapi mengalami perkembangan pesat pada era modern sehingga menjadi kekuatan pembentuk negara-bangsa. Kajian-kajian sejarah dan sosial menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia muncul dari proses panjang interaksi kultural, pengalaman kolonial, dan organisasi-organisasi pergerakan yang menyebarkan gagasan kebangsaan (Alfaki., 2016).

Dalam konteks Indonesia, organisasi seperti Budi Utomo dan pergerakan kebangsaan lain memainkan peran penting merawat kesadaran kolektif yang kemudian dipadukan menjadi cita-cita nasional; proses pendidikan sejarah dan simbol-simbol kebangsaan memperkuat rasa memiliki terhadap tanah air dan membentuk jati diri kolektif. Literatur pendidikan kewarganegaraan menunjukkan hubungan kuat antara pengajaran nilai-nilai kebangsaan dan munculnya sikap patriotik pada generasi muda.

Perkembangan global terutama globalisasi dan digitalisasi memberi tantangan sekaligus peluang bagi nasionalisme: arus budaya asing dapat mengikis identitas tradisional, namun teknologi juga memungkinkan rekonstruksi narasi nasional yang inklusif dan lebih komunikatif. Penelitian terbaru menggarisbawahi bahwa menjaga dan merevitalisasi nasionalisme memerlukan strategi pendidikan, kebijakan budaya, dan pemanfaatan media digital agar jati diri bangsa tetap relevan di era modern (Siska., 2025).

### **Jati Diri Bangsa: Unsur, Dinamika, dan Tantangan Kontemporer**

Jati diri bangsa (identitas nasional) terbentuk dari kombinasi sejarah bersama, simbol-simbol kebangsaan (bahasa, nilai, lambang), pengalaman kolektif, dan narasi publik yang terus diproduksi; unsur-unsur ini menjadi landasan pembentukan solidaritas lintas-etnis. Studi-studi sosial-humaniora Indonesia menekankan peran bahasa nasional, kisah kemerdekaan, serta praktik budaya lokal sebagai pengikat yang menjadikan keragaman sosial tidak menjadi penghalang persatuan (Aulia & Furnamasari., 2021).

Dinamika jati diri bangsa terlihat jelas pada generasi muda yang hidup di persimpangan budaya lokal dan global: kesadaran sejarah dan pendidikan nilai kebangsaan terbukti menurunkan kerentanan terhadap aliran budaya yang mengikis identitas, sementara kekosongan pendidikan kebangsaan membuka peluang alienasi. Oleh sebab itu, sejumlah penelitian menyoroti urgensi memasukkan pendidikan Pancasila, sejarah lokal, dan praktik kewarganegaraan dalam kurikulum untuk memperkuat jati diri generasi penerus (Firmansyah., 2024).

Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mempertahankan jati diri bangsa di tengah arus digital dan komodifikasi budaya: pelestarian local wisdom dan integrasi nilai-nilai kebangsaan ke dalam gaya hidup modern menjadi strategi penting untuk mencegah tergerusnya identitas. Kajian-kajian kontemporer menyarankan pendekatan lintas-sektor pendidikan formal, kebijakan budaya, dan kampanye digital berbasis nilai sebagai langkah praktis untuk memperkuat identitas nasional tanpa menutup akses pada perkembangan global.

#### **1. Nasionalisme Di Era Pra Kemerdekaan**

Semangat nasionalisme Indonesia sudah mulai terasa pada saat berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. walaupun organisasi ini pada awalnya didirikan oleh para pelajar dan mahasiswa Jawa dan Madura tapi orang lainpun bisa masuk. Nama itu punya arti cendekiawan, watak atau kebudayaan yang mulia. Boedi Oetomo menetapkan perhatiannya pada penduduk Jawa dan Madura, dengan bahasa melayu sebagai bahasa resminya. Organisasi ini mengilhami berdirinya banyak organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes yang pada puncaknya mereka mengikrarkan sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928, berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia dan berbahasa satu bahasa Indonesia, walaupun sumpah pemuda bukan identik dengan nasioanlisme tetapi merupakan kebersamaan dalam pluralitas yang sangat dibutuhkan dalam usaha mengintegrasikan bangsa, yang berarti sejalan dengan hakikat nasionalisme (Binder, Leonard., 2001).

Sebelum sumpah pemuda menurut Sartono Kartodirjo, pada tahun 1925 tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia telah mengeluarkan manifesto politik yang mendeklarasikan ideologi nasional yang mendasar yaitu: a. Rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih oleh mereka sendiri. b. Dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri tidak diperlukan bantuan dari pihak manapun. c. Tanpa persatuan yang kokoh dari berbagai unsur rakyat maka tujuan perjuangan ini sulit dicapai

Setelah Boedi Oetomo, lahir Sarekat Islam pada tahun 1912 yang menitik beratkan pada hubungan spiritual agama dan perdagangan yang berkembang menjadi gerakan nasionalisme rakyat yang pertama di Indonesia. S.I. pecah menjadi dua, yaitu S.I. putih yang mengutamakan idiologi Islam dan Pan Islamisme, dan S.I. merah di bawah Semaun, Darsono, dan Tan Malaka yang cenderung kekiri, yang akhirnya menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia yang berpegang pada sosialisme dan internasionalisme dan menganggap nasionalisme sebagai musuh. Pada waktu dirinya merasa kuat PKI melakukan pemberontakan pada 13 November 1926, tetapi kalah dan dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Pada 25 Desember 1912 lahir partai yang berjiwa nasionalis yaitu Indiche Partij yang didirikan oleh Douwes Dekker, tetapi tidak mendapat sambutan rakyat. Pada 4 Juli 1927 Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan wadah nasionalisme modern yang radikal. Ideologi partai tersebut nasional radikal, yang dalam pandangan Bung Karno dianggap bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme (NASAKOM) (Azra, Azyumardi., 2002).

Setelah itu, diikuti kelahiran banyak organisasi, baik yang bercorak keagamaan, politik maupun kepemudaan, seperti Muhammadiyah (18 November 1912), Nahdlotul Ulama (31 Januari 1926), Christelijke Ethische Partij (1916), Indiche Katholieke Partij (1918), Jong Java (1915), Jong Sumatera Bond (1917), dll. Lahirnya beraneka ragam organisasi dapat dikatakan bahwa nasionalisme sudah mulai tumbuh karena senasib penderitaan, yang menginginkan bebas dari penjajahan Belanda, dan ingin mewujudkan cita-cita yaitu masa depan yang lebih baik, yang oleh Anderson disebut Imagined Political Community. Nasionalisme mencapai puncaknya saat dibentuknya BPUPKI pada 1 Maret 1945. Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang beranggotakan 60 orang. Pada awalnya yang akan menjadi ketua adalah Ir. Soekarno, tetapi dengan alasan tertentu akhirnya ditunjuk Radjiman

Wediodiningrat sebagai ketua dengan wakilnya R.P. Soeroso, tujuannya pembentukannya adalah untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan Negara Indonesia Merdeka.

Pada sidang BPUPKI yang pertama dibicarakan tentang berbagai macam pendapat mengenai dasar negara yaitu pendapat Mr. Muhammad Yamin yang mengusulkan lima dasar Negara yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Soepomo mengusulkan dasar Negara adalah Integralistik yaitu Negara bersatu dengan rakyat yang mengatasi seluruh golongan dalam lapangan apapun. Sedangkan Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar Negara. Oleh karena terjadi deadlock dalam sidang I BPUKI, karena adanya perbedaan pendapat tentang dasar negara, yaitu kelompok nasionalis islam dan nasionalis sekuler, maka BPUPKI kemudian membentuk panitia sembilan yang terdiri dari: Moh. Hatta, Muhammad Yamin, Soebardjo, AA Maramis, Soekarno, Abu Kahar Moezakir, Wahid Hasyim, Abikoesno Tjokrosjojono dan Agus Salim (Ricklefs, 2001).

Panitia sembilan pada 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara bagi negara Indonesia yang akan merdeka kelak. Rumusan itu dikenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan lengkapnya adalah: ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada persidangan kedua (10-17 Juli 1945) terjadi perdebatan sengit menyangkut redaksi yang krusial yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Persoalan itu akhirnya berakhir ketika Ir. Soekarno menyakinkan peserta sidang bahwa apa yang dihasilkan Panitia 9 dalam bentuk Piagam Jakarta adalah *modus vivendi*, yaitu kesepakatan luhur Bangsa Indonesia. Pendapat Ir. Soekarno itu akhirnya mampu mengakhiri perdebatan mengenai Sila I Piagam Jakarta dalam Sidang II BPUPKI. Meskipun demikian, atas kebesaran jiwa orang-orang Islam dan demi menjaga persatuan maka rumusan kalimat tersebut akhirnya dihapus dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 (Hobsbawn., 1992).

## 2. Nasionalisme Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Dengan diproklamasikan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara maka cita-cita nasionalisme nomor satu dan dua yang dijelaskan oleh Hertz telah tercapai yaitu persatuan nasional dan kebebasan nasional dari penjajah asing. Namun Belanda dengan membonceng tentara sekutu mendarat di Indonesia dalam upaya merebut dan menduduki kembali Indonesia. Terjadilah bentrok bersenjata di berbagai tempat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga banyak para pahlawan dan syuhada yang gugur di medan perang. Pada 18 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer kedua dan keesokan harinya 19 Desember 1948 Yogyakarta berhasil diduduki Belanda. Pada saat itu para pemimpin republik membiarkan diri ditangkap.

Aksi ini mengejutkan dunia sehingga dewan keamanan PBB meminta untuk dilakukan gencatan senjata. Pada 1 Agustus 1949 diumumkan gencatan senjata dan pada 27 Desember 1949 Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia, dengan bentuk Republik Indonesia Serikat, tetapi tidak termasuk Papua. Setelah melalui pergulatan politik sepanjang paruh pertama tahun 1950,

akhirnya pada 17 Agustus 1950 semua struktur konstitusional semasa revolusi dihapuskan. Bentuk negara serikat diganti dengan negara kesatuan dengan Jakarta sebagai ibu kota. Revolusi belum selesai dan Indonesia masih menghadapi banyak kendala, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Semuanya itu menyebabkan berkembangnya radikalisme di penghujung periode 1950an.

Pada era tersebut dicoba kehidupan demokrasi liberal dengan multi partai dan sistem pemerintahan parlementer. Hal itu menyebabkan instabilitas politik, sehingga terjadi banyak perubahan kabinet. Pada ujungnya, pemerintahan tidak efektif pada masa itu. Pada 19 September 1953 Daud Beureuh mengumumkan Aceh sebagai Darul Islam, lepas dari Jakarta. Pada Bulan September 1957 Daud Beureuh menerima gencatan senjata setelah Jakarta mengembalikan Aceh sebagai propinsi sendiri lepas dari Sumatera Utara. Pemberontakan Darul Islam menyebar luas di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Akhirnya semua pemberontakan dapat dipadamkan kemudian pemilihan umum yang pertama dapat diselenggarakan pada Bulan September 1955 dengan menghasilkan empat partai besar yaitu PNI mendapat 22,3% suara dengan 57 kursi, MASYUMI 20,9% dengan 57 kursi, NU 18,4% dengan 45 kursi dan PKI 16,4% dengan 39 kursi dari total kursi yang diperebutkan 257 kursi.

Dekret 5 Juli 1959 menandai babak baru ketatanegaraan Indonesia yaitu kembali ke UUD 1945 dengan sistem pemerintahan presidensiil, dan akhirnya presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Gelombang radikalisasi terus menguat dengan terus dipelopori oleh kaum muda PKI dan PNI, sehingga terjadi nasionalisasi perusahaan asing, terusirnya warga asing termasuk orang-orang Cina. Pada kurun itu Indonesia berjuang untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda dan terlaksana pada 1962. kekuasaan PKI semakin kuat dengan memenangkan banyak kursi pada parlemen daerah. Yang menggeser PNI, PKI mampu memobilisasi massa dalam mendukung pembebasan Irian Barat, dan perlawanan terhadap Malaysia yang dianggap sebagai neo kolonialisme.

Masa kejayaan Soekarno berakhir dengan tragedi nasional yaitu pemberontakan PKI dan terbunuhnya beberapa jendral serta pembunuhan masal anggota dan simpatisan PKI. Dari sini dapat kita lihat nasionalisme indonesia pasca proklamasi kemerdekaan hingga runtuhnya rezim Soekarno mengambil bentuk perlawanan fisik dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, pemantapan ideologi bangsa (pancasila), pembuatan undang-undang dasar sebagai pembeda dengan bangsa lain (UUD 1945), nasionalisasi perusahaan asing dan pengusiran warga asing.

Nasionalisme pada era Orde Baru ditandai dengan penegasan kembali jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945 dan penggalan kebudayaan nasional, tetapi pada prakteknya terjadi jiwaniisasi dalam segala bidang, baik dalam militer, bahasa, kebudayaan, dll. Orde baru pada awalnya menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia agar mampu membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis, ternyata Orde Baru membangun kekuasaannya atas dasar represi hegemoni, sentralistik dan otoriter yang tidak membuka ruang sedikitpun bagi kritik apalagi oposisi, sehingga Orde Baru dapat menciptakan powerful state (negara kuat). Kebijakan politik Orde Baru ini mampu membawa stabilitas politik dan keamanan yang tak tertandingi dalam sejarah Republik Indonesia. Akan tetapi, seiring dengan situasi yang terus berubah, dengan

masuknya arus globalisasi dan informasi maka tuntutan masyarakat akan terjadinya transparansi dalam politik dan ekonomi, demokratisasi, pemenuhan hak-hak asasi manusia semakin tinggi, pada akhirnya rezim Orde Baru tidak mampu menahan tuntutan masyarakat dan runtuhlah rezim tersebut dengan mundurnya presiden Soeharto pada Mei 1998.

Indonesia memasuki reformasi dengan gonjang-ganjing, terjadi pembakaran gereja di Jakarta, pembakaran masjid di Kupang, muncul kasus Sampit, Maluku, Poso dan lepasnya Timor Timur menjadi negara merdeka. Pada era ini Indonesia menghadapi dua proses dis integrasi sekaligus, yaitu disintegrasi vertical yang ditandai konflik social antar ras dan antar pusat dan daerah, dan disintegrasi horizontal yang ditandai konflik antar suku, ras, agama dan golongan. Pada era ini menguat tuntutan identitas etnis atau ethno nasionalisme yang disuarakan oleh Timor Timur (sudah merdeka) Aceh (mendapatkan otonomi khusus) dan Irian Jaya. Disamping itu kita juga menyaksikan terjadinya penguatan primordialisme agama dengan marak organisasi keagamaan yang radikal dan militant seperti MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam) dll.

### **Islam Dan Nasionalisme Di Indonesia**

Dalam konteks nasionalisme Indonesia dan hubungannya dengan Islam kita dapat mengambil kasus NU (Nahdliou Ulama) sebagai studi kasus sebagai berikut: NU dalam keputusan ijtihad politiknya dalam muktamar di Banjarmasin tahun 1936 mengambil keputusan bahwa negara dan tanah air Indonesia yang masih dijajah Belanda wajib dilestarikan berdasarkan hukum fiqh' Islam. Indonesia saat mendapat kemerdekaan bukan berbentuk negara Islam (Darul Islam) atau negara perang (Darul Harb) melainkan negara damai (Dar'as Shulh).

Resolusi jihad yang dilontarkan oleh KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 yang isinya sebagai berikut: kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan, RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang wajib dibela dan dipertahankan, warga NU wajib mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Memberi gelar pemegang kekuasaan yang sah secara de facto dalam keadaan darurat kepada presiden Soekarno dalam menumpas pemberontakan yang terjadi dimana-mana.

Keputusan menerima asas tunggal Pancasila dan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah final sesuai dengan muktamar NU ke 27 di Situbondo tahun 1984. Keputusan NU tentang wawasan kebangsaan dalam muktamar NU ke 29 di Tasikmalaya. Pada tahun 1994 yang isinya antara lain: NU memandang bahwa nasionalisme tidak bertentangan dengan universalisme Islam bahkan nasionalisme bisa menjadi sarana untuk memakmurkan bumi Allah sebagai amanat-Nya dan sejalan dengan budaya yang dimiliki oleh bangsa, pluralitas yang menyangkut kemajemukan agama, etnis, budaya, dan sebagainya adalah merupakan sunnatullah dan rahmat dalam sejarah Islam, memberikan jaminan bertoleransi, kebersamaan, keadilan, dan kejujuran (Andree Feillard., 2008).

Dari berbagai keputusan muktamar NU dapatlah ditarik kesimpulan bahwa NU telah menunjukkan sikap nasionalisme sejak zaman penjajahan Belanda, karena hal tersebut dilandasi ajaran ahlussunnah wal jama'ah yang

menganut prinsip tawassut (moderat), tawazun (keseimbangan), ta'adul (keadilan), tasamuh (toleransi)

## **KESIMPULAN**

Akar-akar nasionalisme ternyata dapat diketemukan dalam ayat-ayat AlQuran dan dalam kehidupan Nabi Mahammad SAW. Hal inilah yang membuat kalangan Islam nasionalis berani memperjuangkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa mendasarkan diri formalisasi syariat Islam. Kelompok ini menyatakan bahwa kehidupan spiritual diatur oleh agama sedangkan kehidupan duniawi diatur oleh logika duniawi. Pemikiran ini seakan-akan mengandung unsur sekularistik, yaitu adanya pemisahan agama dengan dunia, meskipun sejatinya hanya pemisahan wilayah. Pemikiran seperti dapat mengalirkan pemikiran "Islam politik" ke Islam kultural. Dipihak lain terdapat golongan yang berusaha mengadakan politisasi agama dan agamisasi politik. Politisasi agama berarti menggunakan simbol-simbol agama untuk menggerakkan massa, mengaduk-aduk emosi keagamaan, menjalin kekuatan di parlemen demi tujuan untuk menjadikan agama sebagai alat dari political engineering. Agamisasi politik berarti menjadikan politik yang semestinya ranah publik ditarik keranah privat yang menjadi urusan agama. Urusan politik menjadi urusan agama dan perjuangan politik menjadi perjuangan agama, hal ini bisa mengarah ke berdirinya negara "teokrasi".

## **REFERENSI**

- Alfaqi, M. Z. (2016). Melihat sejarah nasionalisme Indonesia untuk memupuk sikap kebangsaan generasi muda. *Jurnal Kewarganegaraan: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 209–216.
- Aulia, L. R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Mengenal identitas nasional Indonesia sebagai jati diri bangsa untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8549–8557.
- Azra, A. (2002). *Konflik baru antar peradaban: Globalisasi, radikalisme, dan pluralisme*. PT Raja Grafindo.
- Binder, L. (2001). *Islam liberal: Kritik terhadap ideologi pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Feillard, A. (2008). *NU vis-à-vis negara: Pencarian isi, bentuk, dan makna*. LKIS Pelangi Aksara.
- Firmansyah, M. Z. (2024). Menggali makna identitas nasional: Cerminan dan jati diri bangsa. *GURUKU: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(1), 220–224.
- Hobsbawm, E. J. (1992). *Nasionalisme menjelang abad XXI*. Tiara Wacana.
- Kohn, H. (1984). *Nasionalisme: Arti dan sejarahnya*. Erlangga.
- Ricklefs, M. C. (2001). *Sejarah Indonesia modern 1200–2004*. Serambi Ilmu Semesta.
- Yapeta Pusat. (1995). *Sejarah lahirnya Pancasila*. Yayasan Pembela Tanah Air.